SOSEARCH
SOCIAL SCIENCE EDUCATIONAL RESEARCH
Volume 4 No. 2, Tahun 2024
Halaman 22-29
ISSN (Online) : 2774-2776
Doi:
Available online :

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Terkait Perekonomian di Desa Mororejo Kabupaten Kendal dengan Perspektif Modal Sosial

Distya Puspitasari
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Diterima: 03 Maret 2024 | Direvisi: 16 Mei 2024 | Dipublikasikan: 30 Mei 2024

Abstrak

Pencapaian SDG's 14 menjadi tujuan menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir gagal tanpa memahami penggabungan dimensi budaya dan memanfaatkan peran modal sosial yang berkembang untuk mempercepat dan mengoptimalkan hasil. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dengan perspektif modal sosial di Desa Mororejo, Kendal. Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi dan angket. Hasil penelitian ini yaitu modal sosial sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan. Dalam komunitas belajar untuk saling percaya dan dengan bertindak bersama menjadi lebih mampu mengatasi masalah. Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tidak hanya menggunakan sistem positif yang hanya mempertimbangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat berdaya sehingga mengabaikan faktor modal sosial desa itu sendiri. kompleksitas masalah karena keterbatasan sumber daya kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat, yang harus diselesaikan melalui kebijakan yang relatif inklusif yang berfokus pada sistem nilai dan institusi yang mengatur masyarakat. Mengingat modal sosial masyarakat yang cenderung meningkat dengan pemberdayaan tindakan pemerintah, maka intervensi pemerintah lebih ditekankan dan terutama alokasi dana pembangunan di bidang pemberdayaan.
Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat Pesisir, Modal Sosial, Perekonomian, SDG's 14

Abstract

The achievement of SDG's 14 is the goal of maintaining the sustainability of coastal ecosystems. Coastal community empowerment fails without understanding the integration of cultural dimensions and utilizing the role of developing social capital to accelerate and optimize results. The purpose of this study is to determine the economic development of coastal communities with a social capital perspective in Mororejo Village, Kendal. This study uses a descriptive qualitative method. Data collection was carried out through interviews, observations, documentation studies and questionnaires. The results of this study are social capital as a prerequisite for successful development. In a learning community to trust each other and by acting together become more able to overcome problems. The implementation of the coastal community economic empowerment program does not only use a positive system that only considers the skills and abilities of empowered communities so that it ignores the social capital factor of the village itself. the complexity of the problem due to limited resources of both parties, namely the government and the community, which must be resolved through relatively inclusive policies that focus on the value system and institutions that regulate society. Given the social capital of the community which tends to increase with the empowerment of government actions, government intervention is more emphasized and especially the allocation of development funds in the field of empowerment.
***Key words**: Empowerment, Coastal Communities, Social Capital, Economy, SDG's 14*

***How to Cite**:* Distya Puspitasari. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Terkait Perekonomian di Desa Mororejo Kabupaten Kendal dengan Perspektif Modal Sosial. *Social Science Educational Research*, Vol 2(No.2): halaman 22-29.

**Corresponding author:*
E-mail: disa.yunanto06@students.unnes.ac.id

This is an open access article under the CC–BY-SA license

PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 14 bertujuan untuk "melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera" sebagai elemen penting dalam mencapai keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, prinsip ini relevan mengingat komunitas pesisir kerap bergantung pada sumber daya laut untuk keberlanjutan ekonomi dan sosial mereka. Implementasi SDGs 14 mencakup pengelolaan perikanan berkelanjutan, perlindungan ekosistem laut, serta peningkatan kapasitas teknologi dan penelitian kelautan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kesejahteraan ekonomi lokal tetapi juga menjaga keanekaragaman hayati laut untuk masa depan yang berkelanjutan (FKP, 2024; SDGs UB, 2024). Melalui inisiatif ini, masyarakat didorong untuk mengintegrasikan inovasi sosial dan solusi berbasis alam dalam pembangunan pesisir yang berkelanjutan (EmpowerUs, 2024).

Namun, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk keterbatasan teknologi, praktik perikanan yang tidak berkelanjutan, dan akses terbatas ke pasar global. Melalui inisiatif seperti ekonomi biru, Indonesia telah merancang peta jalan untuk meningkatkan kontribusi sektor kemaritiman terhadap PDB nasional hingga 15% pada tahun 2045, sekaligus memperluas kawasan konservasi perairan hingga 30% dari total perairan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan akuakultur berkelanjutan, wisata bahari, dan diversifikasi sektor ekonomi kelautan. Strategi ini menciptakan sinergi antara pelestarian ekosistem laut dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian integral dari transformasi ekonomi biru (BPS, 2023; LautSehat.ID, 2024; SDGs UB, 2024). Pendekatan ini tidak hanya mencakup pengurangan polusi laut tetapi juga penguatan kapasitas komunitas pesisir untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pesisir tidak hanya mendukung tujuan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekologis dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan urbanisasi pesisir (Zulfiqar & Butt, 2021).

Indonesia memiliki potensi laut dan pesisir yang besar. Indonesia ini sering disebut sebagai negara kepulauan. Potensi sumberdaya pesisir Indonesia sangat beragam, mulai dari potensi sumberdaya hayati, potensi wilayah, potensi sumberdaya mineral dan energi, potensi industri, potensi transportasi dan jasa lingkungan (Lasabuda, 2013). Modal sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang warganya tergabung dalam berbagai kelompok sosial yang dipandang sebagai lahan subur bagi tumbuhnya modal sosial. Komponen modal sosial terdiri dari kepercayaan, aturan (norma) dan jaringan yang dapat meningkatkan kinerja masyarakat melalui tindakan yang terkoordinasi.

Menurut Kuznad (Departemen PMP, 2006), penyebab utama kemiskinan di kalangan nelayan adalah: Pertama, pelaku pembangunan kurang memiliki kebijakan, strategi, dan implementasi yang koheren di seluruh program pembangunan pesisir dan masyarakat nelayan. Kedua, jumlah produksi (kuantitas hasil tangkapan) tidak merata, sehingga keberlanjutan kegiatan sosial ekonomi nelayan di desa nelayan terganggu. Masalah ketiga adalah keterisolasian geografis desa-desa nelayan sehingga mempersulit pergerakan barang, jasa, modal dan manusia, serta menghambat mobilitas ekonomi. Keempat, modal komersial atau investasi terbatas sehingga menyulitkan nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Kelima, adanya hubungan sosial ekonomi yang eksploitatif dengan pemilik perahu dan calo dalam kehidupan masyarakat nelayan. Keenam, rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan berdampak negatif terhadap upaya pengembangan usaha dan peningkatan kualitas hidup mereka.

Tingkat keberdayaan masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan masih tergolong kelas sosial rendah (Saefuddin, et al. 2003), hal ini menunjukkan ketidakefektifan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dalam proses pelaksanaan di lapangan biasanya

karena banyaknya pabrik. Salah satunya adalah modal sosial atau community engagement (dukungan moral) yang masih semu. Modal sosial adalah realitas yang dimiliki warga berupa kebaikan, simpati, persahabatan, dan hubungan sosial antara individu dan keluarga yang dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi anggota masyarakat. Dalam konteks ini, hubungan baik antar anggota masyarakat menciptakan jaringan yang bersifat timbal balik bahkan mengingkari individualitas yang biasanya menjadi ciri budaya Barat.

Selain meningkatkan efisiensi perekonomian, modal sosial dalam perekonomian juga dapat memperkuat kekuatan aktor-aktor yang ada. Modal sosial seperti nilai dan norma, jaringan, kepercayaan, timbal balik, pengetahuan dan kelompok dalam suatu komunitas dapat membuat anggotanya lebih mampu memetik manfaat pemberdayaan. Oleh karena itu, pemanfaatan modal sosial pada masyarakat nelayan merupakan pilihan yang sangat penting dan mendesak untuk melawan penurunan sumber daya alam tersebut dan memperkuat ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi berasal dari organisasi pemerintah dan nonpemerintah, termasuk penyediaan modal usaha pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi opini publik antara lain adalah jumlah anggota keluarga dan besarnya modal perusahaan. Manfaat program Pemberdayaan Masyarakat dapat dirasakan di dunia nyata melalui dana pinjaman berbunga sangat rendah di masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat pesisir adalah yang terpenting. Pengelolaan stok ikan yang tidak berkelanjutan dikaitkan dengan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan berkelanjutan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini harus didukung dengan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan pendekatan lingkungan, sosial dan ekonomi, penguatan kelembagaan, mitigasi dan adaptasi pesisir, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta kerjasama regional dan internasional, seperti pengelolaan sumber daya alam berbasis ekoregion.

Pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan memerlukan kebijakan yang komprehensif, terpadu, dan berorientasi pada tujuan yang sejalan dengan pilar pembangunan nasional. Mengubah paradigma dengan fokus pada laut sehingga sumber daya pesisir dan laut dapat dioptimalkan. Dinas Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan tindakan terencana dan terstruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat pesisir. Dalam konteks ini, pemerintah mendukung masyarakat pesisir dengan berbagai kegiatan seperti bantuan permodalan, saran dan dukungan, serta pemberian keterampilan teknis dalam industri perikanan.

Modal sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Ikatan sosial yang kuat, dimana warga negara tergabung dalam berbagai kelompok sosial, dianggap sebagai lahan subur bagi tumbuhnya modal sosial. Komponen modal sosial terdiri dari kepercayaan, aturan (norma) dan jaringan yang meningkatkan kinerja masyarakat melalui tindakan yang terkoordinasi. Modal sosial berupa norma dan jaringan terkait merupakan prasyarat pembangunan ekonomi dan prasyarat mutlak untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan efektif (Kushan Dajani, 2008: 26).

Modal sosial merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Dalam komunitas belajar untuk saling percaya dan dengan bertindak bersama menjadi lebih mampu mengatasi masalah. Pemberdayaan masyarakat harus memasukkan dimensi modal sosial sebagai salah satu komponennya. Pemberdayaan masyarakat gagal tanpa memahami penggabungan dimensi budaya dan memanfaatkan peran modal sosial yang berkembang dalam masyarakat untuk mempercepat dan mengoptimalkan hasil dari proses pemberdayaan. Tujuan Penelitian ini mengetahui pengembangan ekonomi dengan perspektif modal sosial di Desa Mororejo. Modal sosial yang meliputi kepercayaan, resiprositas, norma sosial dan nilai etika, merupakan dasar atau pendukung yang menentukan keberlangsungan berbagai kegiatan ekonomi di berbagai bidang kehidupan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali dan memahami fenomena pemberdayaan masyarakat pesisir dalam perekonomian dengan mengacu pada perspektif modal sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi interaksi sosial, pola hubungan, dan praktik masyarakat secara mendalam. Saat menggunakan metode observasi, paling efektif untuk menambahkan format observasi atau blanko sebagai alat bantu. Bentuk yang digunakan mengandung unsur tentang peristiwa atau perilaku yang digambarkan terjadi. Peran yang paling penting dalam penerapan metode observasi adalah pengamat. Pengamat harus waspada selama pengamatan mereka, yaitu. untuk menatap peristiwa, gerakan atau proses. Mengamati bukanlah hal yang mudah karena manusia sangat dipengaruhi oleh niat dan kecenderungannya. Hasil pengamatan harus sama meskipun dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dengan kata lain, observasi harus objektif.

Metode dokumentasi, yaitu mencari informasi tentang isu atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, tulisan, risalah rapat, agenda, dan lain-lain. Dibandingkan dengan metode lain, metode ini tidak terlalu sulit dalam artian. bahwa sumber datanya masih sama jika terjadi kesalahan dan tidak pernah ada. Metode dokumenter tidak merekam makhluk hidup, melainkan benda mati. Seperti yang telah dijelaskan, dengan metode dokumentasi ini peneliti melakukan kontrol untuk menentukan variabel-variabel yang ditentukan. Jika variabel yang dicari terlihat, peneliti tinggal dengan apa yang telah ditentukan. Jika variabel yang akan dicari terlihat, peneliti tinggal mencarinya atau menambahkannya pada tempat yang tepat. Untuk mencatat hal-hal yang bebas atau tidak terdefinisi dalam daftar variabel, peneliti dapat menggunakan frase bebas.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, yang terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data: Menyederhanakan dan mengorganisasi data mentah ke dalam kategori berdasarkan tema utama, seperti kepercayaan sosial, jaringan, dan norma kolektif.
2. Kategorisasi: Mengelompokkan data ke dalam tema spesifik seperti peran modal sosial dalam pengelolaan usaha, peran pemerintah, dan dinamika kelompok masyarakat.
3. Penyajian Data: Mengorganisasi data dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel tematik untuk mempermudah pemahaman pola pemberdayaan.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Menarik kesimpulan berdasarkan temuan utama dan memverifikasi data melalui triangulasi dengan berbagai sumber informasi (wawancara, observasi, dokumen).

Untuk memastikan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan:

- Triangulasi Data: Membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen.
- Member Check: Mengonfirmasi hasil wawancara kepada responden untuk memastikan akurasi.
- Prolonged Engagement: Peneliti melibatkan diri dalam aktivitas masyarakat selama periode waktu tertentu untuk memahami dinamika sosial secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat lokal merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif dan prakarsa anggota masyarakat. Anggota komunitas tidak dilihat sebagai sistem klien yang bermasalah, tetapi sebagai orang-orang unik dengan potensi dan potensi yang belum pernah dikembangkan. Pengembangan masyarakat lokal adalah interaksi antar anggota masyarakat lokal yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Ada beberapa upaya pemberdayaan terkait, antara lain:

1. Pemberdayaan digunakan untuk meningkatkan potensi atau kekuatan ekonomi masyarakat. Untuk memperkuat potensi tersebut perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, pengetahuan, lapangan kerja dan pasar.
2. Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi kelompok berarti upaya menggurui untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan koherensi dan kemitraan antara yang maju dan yang terbelakang (Warta Demografi, 1997).

Meningkatnya modal sosial dalam kehidupan masyarakat pesisir ternyata dipengaruhi oleh program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penduduk Mororejo. Modal sosial masyarakat diperkuat melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang diprakarsai pemerintah. Kelompok sasaran program PEMP adalah masyarakat mikro dan kecil pesisir yang aktif sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pedagang hasil ikan, pengolah ikan, penyedia jasa penangkapan ikan dan pengelola wisata bahari serta kegiatan lain yang berhubungan dengan laut dan laut. penangkapan ikan

Modal usaha, yaitu dana yang disediakan oleh pemerintah untuk pengembangan usaha masyarakat pesisir (nelayan). Menciptakan modal usaha yang mendorong nelayan untuk meningkatkan pekerjaannya terutama dalam hubungan industrial antar nelayan. Sikap saling membantu sudah menjadi karakter budaya masyarakat. Pertama, seorang pengusaha menyediakan sejumlah uang dengan ekuitasnya untuk membiayai perusahaannya. Kedua, modal hutang adalah modal yang diperoleh dari bank atau bukan bank. Ada beberapa sumber modal dari sumber non-bank. lembaga non bank seperti koperasi dan LEPP-M3).

Peran pemerintah dalam membangun kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tidak lepas dari peran masyarakat. Masyarakat dapat lebih memperhatikan dan memberdayakan mereka untuk membangkitkan potensi yang tersimpan dan mengerahkan semua potensi itu karena mereka merasa berdaya untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sasaran pembangunan adalah masyarakat yang bersesuaian di wilayah desa Mororejo.

Modal usaha seperti peralatan berlayar dan alat tangkap masih belum mencukupi di sebagian besar masyarakat pesisir, karena mereka hanya menggunakan perahu kecil (kano) dengan jaring berlubang dan banyak jahitan untuk menangkap ikan. Sebuah entitas yang didirikan oleh masyarakat pesisir untuk mengelola dana program PEMP. Memfasilitasi akses masyarakat terhadap kelembagaan sumber permodalan masyarakat pesisir dalam rangka pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan dan pengembangan kemitraan masyarakat pesisir dengan lembaga swasta dan pemerintah.

Dengan memperkuat komunitas, modal sosial dapat berkembang. Dengan pemberlakuan PEMP, pemerintah memiliki dorongan atau insentif yang cukup kuat untuk membangkitkan kembali semangat nelayan untuk bekerja produktif. Pemberdayaan masyarakat pesisir meningkatkan keberadaan modal sosial. Peran otonomi daerah khususnya desa menjadi unsur penting dalam pembangunan. Otonomi daerah adalah kemandirian pemerintah dan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi merencanakan kegiatan, menggali dana, mendanai pembangunan, dan mengontrol kegiatan pembangunan desa (Madekhan Ali, 2007:97).

Keberadaan modal sosial didalam masyarakat harus didayagunakan dan dioptimalkan. Karena dalam setiap masyarakat pasti memiliki modal sosial hanya saja tidak difungsikan. Pengaruh PEMP menjadi pengaruh yang dominan dalam meningkatnya modal sosial terutama dalam dimensi kepercayaan dan jaringan. Saling percaya antar sesama kelompok masyarakat pesisir dalam melakukan pekerjaan penangkapan ikan. Hubungan-hubungan yang tersusun akibat interaksi sosial antar individu kelompok dan di luar kelompok (jaringan) semakin terbentuk secara baik. Kekuatan modal sosial dalam masyarakat nelayan dapat mengalami degradasi akibat kurangnya keberdayaan ekonomi di dalam melakukan aktivitas melaut. Meskipun gejala yang khas dimiliki masyarakat Indonesia tetapi modal sosial yang dimiliki sebagian masyarakat Indonesia tampak semakin menipis (Barliana, 2011). Desa Mororejo terdapat wisata salah satunya dengan adanya Pantai Ngebum. Hal ini menjadi pengembangan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat pesisir dengan ketersediaan berbagai kebutuhan sehari-hari. Adapun kedai di Pantai Ngebum dengan manfaat upaya mengatasi kemiskinan ekonomi masyarakat serta perbaikan taraf hidup. Sehingga penyediaan prasarana ekonomi dalam bentuk pengembangan kedai pesisir diharapkan dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Sumber daya manusia masyarakat pesisir yang ditunjuk atau diamanahkan untuk mengelola dan menangani yang baik dan benar. Beberapa masyarakat pesisir yang mempunyai kemampuan keuangan memilih untuk mendirikan kedai dan warung di pesisir yang membantu para nelayan dan keluarganya. Beberapa dari masyarakat sering memberi keringanan pada nelayan untuk membayar hutang setelah mendapatkan uang dari hasil tangkapan.

Wisata yang ada di Desa Mororejo salah satunya adalah Pantai Ngebum. Ini merupakan pekerjaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat pesisir dengan berbagai kebutuhan sehari-hari. Tentang Kedai Pantai Ngebum yang diuntungkan dari upaya mengatasi kemiskinan ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf hidup. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur ekonomi berupa pembangunan warung pesisir diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Sumber daya manusia masyarakat pesisir bertugas atau dipercaya untuk mengatur dan mengelola apa yang baik dan benar. Beberapa masyarakat pesisir yang memiliki peluang ekonomi memutuskan untuk mendirikan kedai dan warung di sepanjang pantai untuk membantu para nelayan dan keluarganya. Beberapa anggota masyarakat sering membantu nelayan membayar utangnya setelah mendapat uang hasil tangkapan.

Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tidak hanya menggunakan sistem positif yang hanya mempertimbangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat berdaya sehingga mengabaikan faktor modal sosial desa itu sendiri. kompleksitas masalah karena keterbatasan sumber daya kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat, yang harus diselesaikan melalui kebijakan yang relatif inklusif yang berfokus pada sistem nilai dan institusi yang mengatur masyarakat. Mengingat modal sosial masyarakat yang cenderung meningkat dengan pemberdayaan tindakan pemerintah, maka intervensi pemerintah lebih ditekankan dan terutama alokasi dana pembangunan di bidang pemberdayaan. Pemberdayaan masih sangat diperlukan untuk memungkinkan masyarakat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan setiap orang.

Modal sosial meningkat ketika, di satu sisi, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan di sisi lain, modal sosial yang lebih kuat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan mengkomunikasikan kekuatan modal sosial secara sengaja, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir untuk tujuan amal dapat tercapai. Meskipun peran pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir masih belum optimal, namun pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir sangat bermanfaat dalam mengatasi kesulitan.

Tingkat kepercayaan publik yang tinggi antara individu dan komunitas juga berperan dalam mencapai kesejahteraan. Iman didasarkan pada norma sosial, adat istiadat dan etika sosial yang

dianut oleh setiap kelompok atau komunitas. Masyarakat memiliki rasa saling percaya yang kuat, sehingga modal sosial masyarakat juga tinggi untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan sosial. Model pertukaran tenaga kerja berkembang menjadi model kooperatif yang didasarkan pada pembagian keuntungan dan upah. Melalui hubungan timbal balik inilah para nelayan melakukan kegiatan ekonominya, saling membantu, saling meminjamkan alat dan perlengkapan (perahu, mesin, jaring, dll) dan menjamin keamanan alat tangkap (karamba, sero, dll), untuk meringankan saling mendukung dalam memecahkan masalah bisnis.

Pemberdayaan masyarakat pesisir sering kali berfokus pada peningkatan akses ekonomi melalui penyediaan modal atau program bantuan keuangan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa program semacam ini dapat terjebak dalam kelemahan struktural, seperti rendahnya tingkat kepercayaan antaranggota masyarakat, lemahnya peran institusi koperasi lokal, dan kurang efektifnya pengawasan pemerintah. Hal ini berdampak pada keberlanjutan manfaat program, yang sering kali hanya membantu jangka pendek tanpa menciptakan kapasitas kemandirian ekonomi jangka panjang (Ridwan & In'am, 2021). Di sisi lain, konsep modal sosial, seperti jaringan sosial, kepercayaan, dan norma kolektif, memiliki potensi untuk memberikan solusi yang lebih holistik dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, tetapi implementasinya sering kali belum optimal karena kurangnya integrasi dengan kebijakan lokal (Sulasmi et al., 2023).

SIMPULAN

Modal sosial merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Dalam komunitas Anda belajar untuk saling percaya dan dengan bertindak bersama Anda menjadi lebih mampu mengatasi masalah. Pemberdayaan masyarakat harus memasukkan dimensi modal sosial sebagai salah satu komponennya. Pemberdayaan masyarakat gagal tanpa memahami penggabungan dimensi budaya dan memanfaatkan peran modal sosial yang berkembang dalam masyarakat untuk mempercepat dan mengoptimalkan hasil dari proses pemberdayaan. Meningkatnya modal sosial dalam kehidupan masyarakat pesisir ternyata dipengaruhi oleh program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penduduk kota Mororejo. Modal sosial masyarakat diperkuat melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dicanangkan pemerintah. Hubungan yang dibangun melalui interaksi sosial antara kelompok individu dan di luar kelompok (jaringan) lebih berkembang. Kekuatan modal sosial masyarakat nelayan dapat melemah karena tidak ada dampak finansial terhadap kegiatan penangkapan ikan. Modal sosial merupakan salah satu sumber daya masyarakat yang terbentuk melalui hubungan antar individu dalam kelompok masyarakat di wilayah Desa Mororejo. Hubungan ini diwujudkan dalam kerjasama antar kelompok masyarakat untuk memperkuat potensi sumber daya dengan tetap menghormati ukuran modal sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Andreas dan Savitri Eni, (2016). Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial (Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hulir). Pekanbaru:

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2023*.

EmpowerUs Project. (2024). *Socio-economic empowerment of coastal communities for sustainable development*. European Commission. Retrieved from CORDIS.

Fathy, R. (2019). Modal sosial: Konsep, inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 6(1), 1-17.

Forum Kajian Pembangunan (FKP). (2024). *Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia menuju Transformasi Ekonomi*.

Hamdan. (2005). Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP 2001) di Kabupaten Jepara dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir. Tesis. Program Studi Magister Manajemen Sumber Daya Pantai. Universitas Diponegoro

Ketaren, Amiruddin. (2015). Modal Sosial Petani dalam Pertanian Berkelanjutan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Daerah. Aceh: Unimal Press.

LautSehat.ID. (2024). *Blue Economy: Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Pesisir melalui Pengelolaan Laut Berkelanjutan*.

Niti Suparjo, Mustofa. (2008) Daya Dukung Lingkungan Perairan Tambak Desa Mororejo Kabupaten Kendal. Jurnal Saintek Perikanan Vol. 4,No.1,2008:50-55. Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan. Universitas Diponegoro

Pontoh, O. (2010). Identifikasi dan analisis modal sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan desa Gangga Dua Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal perikanan dan kelautan tropis, 6(3), 125-133.

Pranadji, T. (2016). Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering (Studi Kasus di Desa-desa (Hulu DAS) Ex Proyek Bangun Desa, Kabupaten Gunungkidul dan Ex Proyek Pertanian Lahan Kering, Kabupaten Boyolali).

Ridwan, M., & In'am, A. (2021). Social Capital Deviation in Capital Assistance System: Socio-Economic Studies of Coastal Communities. *Economies, 9*(4), 204. https://doi.org/10.3390/economies9040204

SDGs Center Universitas Brawijaya. (2024). *Tujuan 14: Ekosistem Laut*.

Sehabuddin, U. (2018). Modal Sosial dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Jurnal Manajemen (Edisi Elektronik), 7(1), 29-38.

Sulasmi et al. (2023). Leadership, Social Capital, and Coastal Community Resource Governance. *Springer*.

Zulfiqar, K., & Butt, M. J. (2021). *Preserving community's environmental interests in a meta-ocean governance framework towards SDG 14*. Sustainability, 13(17). https://doi.org/10.3390/su13179983.